
**KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PADA
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) FAKIR MISKIN
(Studi di Desa Natanangge, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende)**¹Yulianti Theodorik Sari, ²Agustinus Samgar Friday Fry^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM)
Santa Ursula, Ende, IndonesiaCorresponding Email: samgarfry@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 20 Januari 2026; Disetujui: 21 Januari 2026; Diterbitkan: 25 Januari 2025

Abstraksi

Penelitian ini berjudul “Kinerja Implementasi Program Bantuan Sosial pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin; Studi di Desa Natanangge, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende” dengan rumusan masalah: bagaimana kinerja implementasi program bantuan sosial oleh Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin di Desa Natanangge, Kecamatan Maukaro. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dana bantuan sosial bagi tiga Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin di Desa Natanangge. Dana itu dikelola oleh masing-masing kelompok sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhan mereka. Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teori yang digunakan ialah teori implementasi kebijakan publik. Tujuan penelitian, yakni: (1) untuk mengetahui profil Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin di Desa Natanangge, (2) untuk mengetahui profil program, dan (3) untuk mengetahui kinerja implementasi program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin di Desa Natanangge. Dalam penelitian ditemukan beberapa isu penting terkait dengan kinerja pengelolaan dana bantuan, yakni: (1) sampai saat ini tidak ada kegiatan lanjutan dan perkembangan yang berarti dari pengelolaan ternak babi/kambing, (2) pembentukan kelompok yang tidak relevan karena ada anggota kelompok yang tidak layak menerima dana bantuan tersebut, (3) pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada kelompok usaha bersama di Desa Natanangge melalui pendamping belum efektif karena akses yang sulit dalam hal pelatihan dan pembimbingan. Ada beberapa usul saran bagi pemerintah desa dan anggota kelompok usaha bersama, antara lain: (1) pemerintah Desa Natanangge perlu memperhatikan standar-standar kebijakan yang dibuat agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran, (2) para anggota dan pengurus KUBE perlu taat pada kesepakatan bersama dan memberikan sanksi kepada anggota maupun pengurus yang tidak menaati aturan, (3) pemerintah Desa Natanangge dan anggota kelompok usaha bersama harus memperhatikan komitmen, kejujuran, sikap yang demokratis dan mengutamakan kepentingan umum karena setiap masyarakat memiliki hak yang sama atas pelayanan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Bias, Akses**Abstraction**

This research is entitled “Performance of the Implementation of the Social Assistance Program for Joint Business Groups (Kelompok Usaha Bersama/KUBE) for the Poor: A Study in Natanangge Village, Maukaro Sub-district, Ende Regency”, with the research question: How is the performance of the implementation of the social assistance program by the Joint Business Groups for the Poor in Natanangge Village, Maukaro Sub-district? This research was motivated by the existence of social assistance funds allocated to three Joint Business Groups for the Poor in Natanangge Village. The funds were managed by each group according to their business type and needs. This is a descriptive qualitative study using interviews and observations as data collection techniques. The theoretical framework employed is the public policy implementation theory. The objectives of this study are: (1) to understand the profile of the Joint Business Groups for the Poor in Natanangge Village, (2) to examine the program profile, and (3) to assess the performance of the

implementation of the KUBE social assistance program in the village. The study identified several key issues in the performance of fund management: (1) there has been no significant follow-up activity or development in livestock management (pigs/goats), (2) the formation of the groups was inappropriate as some members were not eligible for the aid, and (3) the support provided by the Department of Social Affairs through facilitators was ineffective due to limited access to training and mentoring. The study offers several recommendations for the village government and KUBE members, including: (1) the Natanangge Village government should ensure that policy standards align with the actual needs of the target groups, (2) KUBE members and leaders must adhere to agreed rules and impose sanctions on those who fail to comply, and (3) both the village government and group members should prioritize commitment, honesty, democratic values, and the public interest, as every citizen has equal rights to public services.

Keywords: Accountability, Refraction, Access

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan pengemban amanat rakyat berperan aktif bagi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, pangan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan merupakan salah satu program sosial yang amat serius. Sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim digunakan untuk mendekati masalah kemiskinan (Sunyoto Usman, 2004), yaitu perspektif kultural (*cultural perspective*) dan perspektif struktural atau situasional (*situational perspective*). Masing-masing perspektif tersebut memiliki tekanan, acuan, dan metodologi tersendiri yang berbeda dalam menganalisis kemiskinan. Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis: individual, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan menurut perspektif situasional, masalah kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern (Baharudin, 2014: 13). Sejak pertemuan kepala negara dengan 14 menteri kabinet pembangunan VI pada awal April 1993, pemerintah kembali menegaskan tekad untuk menanggulangi kemiskinan. Pada April 1994 diluncurkanlah Inpres Desa Tertinggal (Inpres No. 5/1993) untuk menanggulangi kemiskinan di 20.633 desa miskin pada waktu itu.

Program IDT ini diharapkan menjadi sebuah gerakan moral yang memberi kesempatan bagi semua pihak, terutama penduduk miskin itu sendiri. Secara spesifik, sasaran program ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi penduduk miskin melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pematapan kelembagaan usaha bersama kelompok miskin tersebut (Sunyoto Usman, 2004: 125-135). Dengan sumber daya yang tersedia, pemerintah bertindak aktif dalam kebijakan anggaran untuk mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama penanggulangan kemiskinan. Salah satu kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat miskin ialah pendirian aset ekonomi seperti bantuan dana atau modal usaha.

Berbagai usaha peningkatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan selama ini melalui pemberian bantuan telah menunjukkan adanya kemajuan yang dapat dijadikan tolak ukur. Kendati demikian, usaha untuk meningkatkan dan memperluas kesejahteraan sosial melalui kebijakan paket bantuan selalu dihadapkan pada terbatasnya kapasitas yang dimiliki masyarakat miskin dan minimnya sarana dan prasarana. Dalam konteks pekerjaan sosial, upaya penanganan terhadap fakir miskin diarahkan pada pembinaan dan pemberian bantuan

untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sehingga mereka dapat membantu dirinya sendiri (*help people, help themselves*). Bantuan semula yang bersifat stimulatif dengan sistem bergulir disebut Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan fokus kegiatan: Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS): kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran bagi terlaksananya perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku budaya miskin ke arah sikap dan tingkah laku yang lebih konstruktif dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial keluarga yang dibina. Usaha Ekonomi Produktif (UEP): kegiatan ekonomi keluarga pedesaan skala kecil yang pembinaannya diarahkan kepada kesinambungan usaha dan juga agar binaan dapat menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk membayar iuran kesejahteraan sosial (IKS) yang bilamana telah terkumpul selanjutnya digulirkan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan.

Penanggulangan kemiskinan melalui kelompok usaha bersama dengan cara penghimpunan dana iuran kesejahteraan sosial (IKS) yang digulirkan kepada kelompok yang membutuhkan merupakan wujud kepedulian sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hasil yang ingin dicapai ialah fakir miskin yang dapat mengerti, memahami dan melaksanakan perannya sebagai individu, keluarga, dan anggota masyarakat dan serta mampu produktif. Adapun program yang dijalankan pemerintah Desa Natanangge, yaitu program pemberdayaan masyarakat berupa pengadaan modal usaha kepada kelompok ternak dan pelatihan kelompok ternak. Program pemberdayaan masyarakat ini merupakan sebuah upaya bijak yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada. Program ini merupakan upaya pemerintah desa dalam proses pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Natanangge Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin, dinyatakan bahwa kelompok ini merupakan kumpulan sekelompok masyarakat dengan ekonomi lemah atau fakir miskin yang tergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, berkoordinasi serta mewujudkan masyarakat fakir miskin yang mandiri dan sejahtera. Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) merupakan kelompok usaha bersama di tingkat desa yang melayani dan memfasilitasi keberlangsungan usaha bersama berdasarkan kesepakatan bersama sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa yang berbasiskan peternakan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut pada tahun 2017 kantor Kementerian Sosial RI Jakarta melalui Dinas Sosial Kabupaten Ende telah menggulirkan dana bantuan sosial kepada tiga Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Desa Natanangge, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende sebesar 20 juta rupiah untuk masing-masing kelompok atau total 60 juta rupiah. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat miskin di Desa Natanangge, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. Proses pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin bertolak dari kesadaran masyarakat terhadap masalah kemiskinan yang melilit hidup mereka sehingga mereka sangat sulit berkembang. Selanjutnya kelompok yang telah terbentuk itu didata dan diajukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Ende. Berdasarkan kewenangannya Dinas Sosial melakukan survei

tentang kelayakan kelompok yang telah dibentuk. Ketiga kelompok yang dibentuk sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala Desa Natanangge Nomor 9 Tahun 2017 ialah Kelompok Suka Maju, Kelompok Merpati dan Kelompok Usaha Bersama yang masing-masing beranggotakan 10 orang. Masing-masing kelompok diharuskan untuk mengelola ternak babi/kambing yang telah diadakan oleh kelompok secara baik sehingga hasil dari perkembangbiakan tersebut dapat membentuk kelompok-kelompok baru yang lain.

Kenyataannya dana bantuan yang telah diberikan kepada 3 kelompok usaha bersama, yakni kelompok usaha ternak hewan di Desa Natanagge yang telah dibentuk sejak tahun 2017 sampai saat ini belum berkembang dan membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh bahwa pada tahun 2017 masing-masing kelompok telah membeli hewan ternak (babi/kambing) yang siap dikawinkan sebanyak 20 ekor. Hewan yang dibeli oleh setiap kelompok disatukan dalam kandang yang telah disiapkan sejak awal dengan pemberian makan secara bergilir. Sekitar tiga bulan kemudian hewan ternak diberikan kembali kepada setiap anggota kelompok sebanyak 2 ekor dengan berbagai alasan: kurangnya kerja sama, tidak ada kekompakan, ada beberapa anggota yang tidak serius dalam pengadaan dan pemberian makanan, ada beberapa anggota kelompok yang tidak mengikuti kegiatan pertemuan dan kurangnya perhatian dari pemerintah desa. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2018 ditemukan beberapa anggota kelompok yang sudah tidak memiliki hewan ternak lagi karena serangan wabah penyakit ataupun dijual karena kebutuhan dan makanan yang tidak terjamin. Pada tahun 2019 usaha ternak babi ini juga tidak menunjukkan hasil yang berarti, justru makin turun dari tahun sebelumnya. Tiga Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Natanangge yang telah dibentuk sejak tahun 2017 sampai saat ini belum mampu menciptakan kelompok baru.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan program KUBE-FM yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan dan tujuan dari program KUBE-FM sehingga program ini dapat berkembang dan mampu menciptakan kelompok-kelompok baru agar masyarakat yang tidak mampu lainnya dapat menikmati hasil dari program KUBE-FM. Penelitian ini juga penting untuk mengetahui seberapa optimal pengelolaan ternak oleh kelompok usaha bersama fakir miskin dan korelasinya terhadap perekonomian dan taraf hidup masyarakat Desa Natanangge. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Implementasi Program Bantuan Sosial pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin; Studi di Desa Natanangge, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende.”

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu proses penting dalam administrasi publik, yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Van Metter dan Van Horn (Subarsono, 2008:195), implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari sektor pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Esensi dari implementasi kebijakan terletak pada pemahaman tentang apa yang harus

dilakukan setelah suatu program dirumuskan, mencakup pengadministrasian kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Sebagai proses yang berkelanjutan, implementasi kebijakan tidak hanya menghubungkan tujuan kebijakan dengan hasil yang diharapkan tetapi juga menciptakan sistem penyampaian kebijakan (*policy delivery system*). Purwanto dan Sulistyastuti (2015:99) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dimulai dari penyusunan kebijakan hingga memastikan kelompok sasaran dapat merasakan dampak nyata dari kebijakan tersebut. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap peraturan yang telah atau belum diterapkan untuk menilai efektivitas kebijakan.

Dalam pandangan Waimer dan Vining (Ibrahim, 2019), terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: logika kebijakan, lingkungan operasional, dan kemampuan implementor kebijakan. Logika kebijakan mengacu pada keberadaan argumen teoritis yang mendukung kebijakan sehingga dapat diterima secara rasional. Lingkungan operasional mencakup konteks sosial, politik, ekonomi, dan geografis yang memengaruhi penerapan kebijakan. Sementara itu, kemampuan implementor kebijakan menyoroti pentingnya kompetensi dan keterampilan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Penilaian kinerja implementasi kebijakan memerlukan indikator yang dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Menurut World Bank (1996), indikator kinerja mencakup pengukuran terhadap dampak, hasil, keluaran, dan input dari suatu proyek atau kebijakan untuk menilai kemajuan yang dicapai. Fungsi utama indikator adalah memberikan gambaran kualitatif atau kuantitatif tentang tingkat pencapaian suatu tujuan kebijakan. OECD/DAC (2006) menekankan bahwa indikator harus mampu menggambarkan situasi yang terjadi ketika suatu tujuan tercapai, sehingga menjadi alat yang relevan untuk mengukur perubahan yang dihasilkan dari implementasi suatu kebijakan.

Indikator kinerja dapat dibedakan menjadi indikator output dan outcome. Indikator output mengukur konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran, seperti penerimaan subsidi atau hibah, sementara indikator outcome menilai dampak jangka panjang yang terjadi akibat implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, Ripley (Purwanto, 2015:102-110) mengidentifikasi beberapa indikator kinerja implementasi kebijakan yang penting. Aksesibilitas merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana kelompok sasaran dapat menjangkau layanan atau informasi kebijakan tanpa hambatan diskriminasi. Hal ini mencakup kemudahan komunikasi dengan penyedia layanan maupun lokasi yang mudah dijangkau. Indikator cakupan mengukur seberapa banyak kelompok sasaran yang berhasil dijangkau oleh kebijakan, dengan memperhitungkan proporsi antara kelompok yang menerima layanan dengan jumlah total yang berhak. Frekuensi layanan juga menjadi penting untuk kebijakan yang membutuhkan pemberian layanan secara berkala, seperti program bantuan pangan atau subsidi lainnya.

Selanjutnya, bias menjadi indikator untuk menilai apakah implementasi kebijakan telah menyimpang dari kelompok sasaran yang ditetapkan. Sebagai contoh, penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria dapat menjadi indikasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketepatan waktu layanan juga menjadi indikator yang penting, terutama untuk kebijakan yang sangat sensitif terhadap waktu, seperti program pembelian hasil panen petani. Selain itu, akuntabilitas memastikan bahwa implementor bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran. Kesesuaian program dengan kebutuhan kelompok sasaran menjadi indikator terakhir

yang menunjukkan sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan relevan dengan kebutuhan aktual masyarakat. Misalnya, distribusi alat atau fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan berakhir sia-sia dan tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Dengan memahami berbagai indikator tersebut, pelaksana kebijakan dapat menilai efektivitas implementasi kebijakan dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Evaluasi yang berbasis indikator kinerja ini tidak hanya membantu memastikan keberhasilan kebijakan tetapi juga memberikan dasar untuk reformasi kebijakan yang lebih baik di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Saifudin Azwar (2015: 6), penelitian deskriptif berarti menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mencoba mencocokkan realitas di lokasi penelitian dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Di sini peneliti berupaya melukiskan dan menjelaskan implementasi program bantuan sosial oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Desa Natanange, Kecamatan Maukaro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas

Menurut Cf. Ripley (Purwanto, 2015:109), indikator akuntabilitas digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan di sini ialah apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah penyimpangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sistem pengelolaan ternak babi/kambing masih dilakukan secara tradisional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ada beberapa anggota kelompok yang tidak menaati aturan yang dibuat oleh KUBE. Aturan itu berupa hasil kesepakatan internal antara anggota dan pengurus, dalam hal ini setiap bulan pertemuan akan diadakan dan setiap anggota wajib membayar iuran. Pelanggaran terhadap aturan tersebut sangat berpengaruh dalam pengelolaan ternak babi/kambing sehingga hasilnya tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah desa tidak memberikan kepuasan terhadap pengurus dan anggota kelompok. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kontrol atau tanggung jawab dari pemerintah desa kepada anggota KUBE sebagai implementor terkait dengan pengelolaan ternak babi/kambing.

Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian dapat dipakai untuk menilai akuntabilitas. Berdasarkan penelitian, ada beberapa anggota KUBE yang tidak bertanggungjawab menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sejak awal terkait pertemuan bulanan dan iuran wajib. Di sisi lain, kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada anggota KUBE juga tidak memberikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kontrol dari pemerintah desa kepada pengurus dan anggota KUBE. Peneliti menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban oleh pemerintah desa, pengurus dan anggota KUBE dalam pelaksanaan kerja yang dipercayakan dari Dinas Sosial masih sangat rendah. Kurangnya kontrol dari pemerintah desa merupakan salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan perkembangan pengelolaan ternak babi/kambing. Untuk menanganinya,

pemerintah desa, pengurus dan anggota KUBE harus lebih bertanggungjawab terhadap tugas yang telah diberikan.

2. Bias

Menurut cf. Ripley (Purwanto, 2015:102-110) Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi kelompok sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program masih ditemukan adanya penyimpangan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan melalui proses pemberian pelayanan dari pemerintah desa lebih kepada masyarakat yang mampu. Sedangkan untuk pengelolaan ternak babi/kambing yang dilakukan oleh anggota KUBE menyimpang dari aturan yang dibuat, seharusnya pengelolaan ternak babi/kambing dilakukan secara kelompok namun secara teknis dilapangan berbanding terbalik dengan apa yang sudah disepakati. Kenyataan yang terjadi di desa Natanangge pembentukan kelompok yang tidak relevan karena ada anggota kelompok yang tidak layak menerima dana bantuan tersebut. Selain itu cara pengelolaannya menyimpang dari tujuan KUBE.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas jika dikaitkan dengan Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Cf. Ripley bahwa teori ini sangat relevan dengan masalah yang diangkat dimana dalam teorinya membahas tentang apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi kelompok sasaran atau kelompok masyarakat penyimpangan. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dan observasi bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pengurus dan anggota KUBE menyimpang dari aturan. Hal ini dibuktikan melalui proses pemberian pelayanan dari pemerintah desa lebih kepada beberapa anggota masyarakat yang mampu. Serta pengelolaan ternak babi/kambing yang dilakukan oleh anggota KUBE menyimpang dari aturan yang dibuat, seharusnya pengelolaan ternak babi/ kambing dilakukan secara kelompok namun secara teknis dilapangan berbanding terbalik dengan apa yang sudah disepakati. Peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa, pengurus dan anggota KUBE telah melakukan penyimpangan terhadap aturan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dan proses pengelolaan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Oleh karena itu, untuk menanganinya, pemerintah Desa Natanangge dan pengurus serta anggota KUBE harus kembali memberikan perhatian pada kebijakan yang telah disusun. Mereka juga perlu memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan kebijakan seperti komitmen, kejujuran, tindakan yang demokratis dan mengutamakan kepentingan umum.

3. Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu, akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin

menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya seperti gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses juga dapat berarti tidak terjadi diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu ataupun kelompok. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan program atau pelayanan masih sulit dijangkau, dalam hal ini pelatihan, sosialisasi atau informasi terkait dengan pengelolaan ternak. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa pelatihan atau sosialisasi jarang dilakukan dan kelompok masyarakat lainnya yang tergolong fakir miskin tidak dapat mengakses program bantuan ini karena kelompok yang telah mendapat bantuan tidak mampu menciptakan kelompok baru.

Peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial melalui pendamping belum efektif. Hal ini terjadi karena kelompok sulit mendapatkan akses dalam hal pelatihan dan pembimbingan. Kurangnya kontrol yang dilakukan oleh Dinas Sosial merupakan salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan perkembangan pengelolaan ternak babi/kambing. Oleh karena itu, untuk membuat pelayanan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran, Dinas Sosial harus terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana pelayanan, pelatihan, dan pendampingan dilakukan oleh pendamping, serta melihat bagaimana perkembangan usaha kelompok.

KESIMPULAN

Pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUBE) Desa Natanangge merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahun 2017 dibentuklah 3 KUBE untuk mengelola dana tersebut, yaitu KUBE Sukamaju, KUBE Merpati, dan KUBE Maju Bersama. Dari penelitian terhadap ketiga kelompok tersebut, ditemukan 3 hal penting yang menjadi kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini, yakni: Pertama, Akuntabilitas mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelompok belum optimal sebab pada dasarnya tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelompok anggota tidak mengikuti aturan yang telah dibuat. Kedua, Bias tentang penyimpangan yang terjadi di Desa Natanangge ialah pembentukan kelompok yang tidak relevan karena ada anggota kelompok yang tidak layak menerima dana bantuan. Selain itu, cara pengelolaannya menyimpang dari tujuan KUBE. Ketiga, Akses dimana pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial kepada kelompok usaha bersama di Desa Natanangge melalui pendamping belum efektif. Hal ini terjadi karena kelompok sulit mendapatkan akses dalam hal pelatihan dan pembimbingan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti hendak mengusulkan beberapa usul saran, baik kepada pemerintah Desa Natanangge dan anggota KUBE. Pemerintah Desa Natanangge perlu memperhatikan standar-standar kebijakan yang harus dibangun dan kesesuaian kebijakan tersebut dengan kebutuhan dari kelompok sasaran. Pemerintah Desa Natanangge dan anggota KUBE harus memperhatikan komitmen, kejujuran, sikap yang demokratis dan mengutamakan kepentingan umum sehingga setiap masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggito, Aldi dan Johan Setiawan. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. 2013. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bambang, Riyanto. 2010. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, ed.4. BPFE Yogyakarta.
- Ibrahim, JT (2019). Sosiologi Pedesaan . UMPress.
- Mariyani, Rita, dan Ali, Nugraha, Rachmawati, Yeni. 2010. Pengelolaan Lingkungan Belajar. Jakarta: Prenada Media Group.
- Oktara, P.L. 2019. Buku Pintar Mengelola Dana Desa. Yogyakarta: Desa Pustaka Indonesia.
- Purwanto, Agus Erwan, dan Sulistyastuti, Ratih Dyah. 2015. Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono, AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat, Gunawan, dan Wulandari, Ari. 2016. Membangun Indonesia dari Desa, Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Yogyakarta: Media Persindo.
- Usman, Sunyoto, 2004, Diantara Harapan dan Kenyataan, Center for Indonesian Research and Development, Yogyakarta.
- Usman, Sunyoto. 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo.

Jurnal:

- Baharudin. (2014). Pendidikan dan pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan pesisir. Society: Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi FITK IAIN Mataram, 1(1), 1–58. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/society/article/view/1451>

Undang-undang:

Inpres No. 5 Tahun 1993 tentang Desa Tertinggal

Sumber Online:

Para ahli.Net, “Pengertian-Pengelolaan” dari <http://www.pengertian>, diakses pada 8 April 2022.

Jogloabang. “Fakir-Miskin” dari <http://fakir-miskin/>, diakses pada 8 April 2022.